Dikuat di Majalah Agro Observer 2008

”DOMPO” DI DALAM SOAL AGRARIA

Hariadi Kartodihardjo[1]

Kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para pembuat kebijakan adalah keliru dalam merumuskan masalah, dan bukan keliru dalam memecahkan masalah. Demikian antara lain pernyataan dalam suatu referensi kebijakan publik. Mengerikan! Ibarat seorang dokter, banyak pembuat kebijakan keliru melakukan diagnosa, sehingga penyakit yang sebenarnya tidak diobati, dan si pasien makan obat yang keliru. Kapan, dengan demikian, pertama kali suatu kebijakan dibuat secara keliru; yaitu saat pembuat kebijakan melihat fakta.

Di kalangan akademisi dan dunia mahasiswa pada umumnya, persoalan agraria bukan hanya salah dilihat, tetapi terletak jauh dibelakang tumpukan konsep dan rumus, sehingga tidak terlihat. Persoalan hak dan status sumberdaya agraria dianggap sudah mapan. Ilmu dan pengetahuan berdiri di atas kemapanan itu, dan yang tersisa adalah upaya meningkatkan produktivitas dengan teknologi, transfer pengetahuan, rekayasa pasar, fiskal dan moneter. Dan terbangunlah pembangunan ekonomi.

Di kalangan politisi dan pengamat, ukuran-ukuran pembangunan ekonomi yang berdiri di atas anggapan kemapanan hak dan status sumberdaya agraria menjadi perdebatan. Semakin elit lokus pembahasannya, semakin kabur argumen yang sampai ke publik. Politisi yang perjuangannya sesuai fakta tidak dapat muncul ke permukaan karena tidak dapat menggunakan bahasa yang sesuai dengan arus besar politisasi keadaan.

Di kalangan birokrasi pembuat kebijakan, yang dipegang adalah koridor hukum. Tidak akan ada langkah inovatif kalau tidak sejalan dengan pasal-pasal peraturan-perundangan. Tidak ada opini, yang ada adalah gerakan nyata program dan kegiatan pembangunan berdasarkan struktur penguasaan sumberdaya agraria yang *given*. Kesalahan hampir tidak dapat diperbaiki, karena faktor ”policy trap”. Inovasi di lapangan yang sesuai dengan fakta, salah menurut pasal-pasal peraturan.

Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pikiran, keinginan dan tindakan sudah terstruktur dalam tujuan ”kebenaran” yang telah terletak jauh di luar fakta. Ilmu dan teknologi, ukuran kinerja pembangunan, perjuangan politik, selalu dimenangkan oleh ”kebenaran” yang asumsinya keliru. Meskipun begitu, ”kebenaran” tersebut ditopang oleh bangunan sosial-politik sejak di bangku sekolahan. Seseorang petani di Jawa Tengah menyebut kondisi demikian itu sebagai *dompo*. Yaitu pada saat seseorang menganyam tikar, secara tidak sadar menghasilkan komposisi anyaman yang salah, tetapi sudah terlanjur ditutupi oleh komposisi anyaman yang benar. Dompo tidak akan diperbaiki – karena sama dengan membuat tikar baru, dompo menurunkan kualitas tikar. Jika dijualpun tidak akan dipilih pembeli.

ooo

Penataan kembali struktur penguasaan sumberdaya agraria – reforma agraria, adalah pondasi, bukan hanya bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga keadilan sosial dan basis pelestarian fungsi sumberdaya alam. Struktur penguasaan itu sendiri terbangun oleh hubungan antar individu, individu dan lembaga, serta antar lembaga di bawah implementasi peraturan-perundangan dengan berbagai bentuk transaksinya. Struktur

[1] Pengajar di Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI.